

Studi Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun

Bimelda Afrian Nasution

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

bimeldaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, pengendalian internal pemberian kredit serta kendala-kendala yang terjadi dalam penagihan kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian kredit pada PT. BPRS Bina Barumun sudah berjalan dengan baik seperti Nasabah melakukan permohonan kredit kepada customer service, mengisi lembar aplikasi permohonan kredit (APK) kemudian diberikan kepada bagian administrasi kredit. kemudian diserahkan kepada account officer (AO). Bagian AO) melakukan wawancara dan survei on the spot. Setelah itu membuat laporan analisis kredit (LAK) untuk diserahkan kepada komite kredit selanjutnya memutuskan diterima atau tidaknya permohonan kredit. Administrasi kredit menerima APK dan LAK untuk disimpan sebagai arsip. Selanjutnya administrasi kredit membuat surat persetujuan kredit (SPK) 2 lembar yang disertai tanda tangan nasabah. Lembar 1 untuk administrasi kredit dan lembar 2 untuk nasabah. Berdasarkan SPK yang telah disetujui, administrasi kredit membuat perjanjian kredit (PK) sebanyak 2 lembar, lembar 1 untuk kasir dan lembar 2 untuk accounting. Kasir memberitahukan tentang pengikatan kepada nasabah. Selanjutnya nasabah memberikan jaminan asli, kemudian kasir melakukan realisasi kredit serta memberikan PK kepada nasabah. Jaminan asli diserahkan kepada administrasi kredit sebagai arsip. Berdasarkan PK, accounting melakukan pembukuan serta menyerahkan lembar PK kepada administrasi kredit sebagai arsip. Administrasi kredit menerima jaminan asli dan PK untuk dijadikan arsip. PT. BPRS Bina Barumun sudah lima komponen dalam pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, pemrosesan informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dari lima komponen pengendalian internal tersebut, perlu adanya analisis dalam pemberian kredit untuk kelancaran bisnis dalam perusahaan. Kendala dalam penagihan kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun Dari pihak perbankan Misalnya dalam melakukan analisis, pihak manajer atau bagian kredit kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah sendiri kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal, yaitu: Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada PT.BPR Bina Barumun, sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur keamanan untuk membayar. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mau membayar tetapi tidak mampu. Contoh: kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir atau bangkrut. Sehingga untuk membayar kredit tidak ada.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pemberian Kredit

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta lembaga keuangan yang berada di dalamnya. Salah satu peran serta dari lembaga keuangan, khususnya dalam perbankan adalah Kredit. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Risiko terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Terjadinya kredit macet kemungkinan karena adanya pengaruh negosiasi dari calon debitur dengan petugas bank agar hasil kredit sesuai keinginan calon debitur, sehingga terkadang pemberian kredit lebih besar dari kebutuhan dan juga kemungkinan masih ada calon debitur yang memberikan keterangan yang baik-baik saja tentang usahanya. Risiko kemacetan kredit dapat dikurangi dengan menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif. Sistem pengendalian intern merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern serta sistem informasi akuntansi dibutuhkan untuk kelancaran proses pemberian kredit.

Kasmir (2012) mengatakan bahwa penilaian kredit harus memperhatikan prinsip 5C yang terdiri dari: character, capacity, capital, collateral dan condition of economy untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, sehingga adanya kredit bermasalah dapat diminimalkan. Kredit macet merupakan kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada tanggal jatuh tempo belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.

Untuk mengatasi adanya kredit bermasalah maka dipandang perlu untuk melakukan analisis pengendalian internal sebelum dilakukannya suatu pemberian kredit. Pengendalian internal adalah system organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013). Selain itu pengendalian internal juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses yang harus dijalankan oleh suatu entitas, yang mana proses tersebut mencakup kebijakan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama (Halim, 2011).

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut M.Guy (2011: 229) dalam laporan COSO (Comintte of Sponsoring Organization) antara lain : lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, pemantauan. Agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi control dan pengendalian dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalah gunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumon adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumon sistem pengendalian internal diawasi oleh satu bagian yaitu Bagian Pengawas yang terdiri dari satu orang yang mengawasi pengendalian internal yang ada pada perusahaan. sistem pengendalian yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumon sebenarnya

sudah baik, namun masih ada karyawan yang tidak terlalu memperhatikan adanya prosedur yang ada pada perusahaan, seperti bagian account office. Dimana dalam pemberian kredit kurang memperhatikan prosedurnya, sehingga berkas-berkas dalam pemberian kredit tidak lengkap dan hal ini bisa menyebabkan adanya kredit bermasalah terjadi.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Intern, Pemberian Kredit. Jenis data penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu Data yang diperoleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara pada bagian keuangan di perusahaan. Data sekunder yaitu data yang telah di oleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti atau pihak lainnya guna mendukung data primer baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan seperti dokumen-dokumen perusahaan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Prosedur Pemberian Kredit PT. BPR Bina Barumun

Di dalam aktivitas pengendalian prosedur permohonan kredit pihak-pihak yang terlibat adalah peminjam, bagian administrasi, bagian Marketing Officer, Bagian SID (Sistem Informasi Debitur), Komite Kredit, legal, kabid operasional, dan kasir. Pertama yaitu peminjam/ calon debitur datang ke kantor mengisi berkas-berkas form permohonan pinjaman (Formulir Permohonan Kredit, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy BPKB/STNK, Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Fotocopy SIUP (Khusus Usaha), fotocopy NPWP) pada bagian administrasi. Setelah itu bagian administrasi menganalisa identitas pemohon, melakukan wawancara dan mendaftarkan permohonan apakah disetujui atau ditolak. Jika diterima bagian Account Officer akan melakukan survey lapangan secara on the spot sesuai berkas-berkas (form permohonan pinjaman, form penilaian jaminan, Form Analisa kepada debitur. Jika memang syarat sudah sesuai, Akan dilakukan pengecekan calon nasabah oleh bagian SID (Sistem Informasi Debitur) secara komputerisasi data register nasabah dari bagian administrasi dengan melihat pada website yang ada pada Bank Indonesia. Dan selanjutnya berkas dari Marketing Office (form permohonan pinjaman, form penilaian jaminan, Form Analisa dan juga identitas nasabah dari bagian SID akan di periksa oleh Komite Kredit (Dirut, Wadirut, Kabid marketing, Kasi kredit, dan Account Office) untuk diputuskan apakah calon nasabah diterima atau ditolak, jika ditolak maka keluar Surat Penolakan Kredit akan diberikan kepada bagian administrasi untuk diarsip. Jika nasabah diterima akan dibuatkan Surat Persetujuan Kredit yang akan diberikan kepada bagian Legal. Dari surat persetujuan kredit Bagian legal membuat surat perjanjian kredit, buku angsuran, Nota pinjaman selanjutnya nota pinjaman, dan buku angsuran akan dicek oleh kabid operasional yang akan disesuaikan dengan SK (Surat Keputusan dan Notulen). Selanjutnya bagian kasir akan menerima nota pinjaman dan buku angsuran untuk diteliti lagi, jika semua sudah sesuai serahkan uang dan buku angsuran kepada nasabah.

Produk pinjaman PT. BPR Bina Barumun meliputi, kredit pegawai, kredit umum, kredit kendaraan, kredit perumahan, dan kredit khusus. Peneliti sengaja

hanya membahas kredit umum saja dan tidak membahas lebih lanjut produk pinjaman yang lain karena menurut peneliti, kredit umum yang lebih beresiko terhadap kesalahan dan penyelewengan yang akan merugikan bank. Prosedur pemberian kredit PT. BPR Bina Barumun meliputi:

- a) Nasabah melakukan permohonan kredit kepada customer service, mengisi lembar aplikasi permohonan kredit (APK) kemudian diberikan kepada bagian administrasi kredit.
- b) Administrasi mengecek kebenaran APK kemudian diserahkan kepada account officer (AO).
- c) Account officer (AO) melakukan wawancara dan survei on the spot. Setelah itu membuat laporan analisis kredit (LAK) untuk diserahkan kepada komite kredit.
- d) Komite kredit melakukan musyawarah atas LAK untuk selanjutnya memutuskan diterima atau tidaknya permohonan kredit.
- e) Administrasi kredit menerima APK dan LAK untuk disimpan sebagai arsip. Selanjutnya administrasi kredit membuat surat persetujuan kredit (SPK) 2 lembar yang disertai tanda tangan nasabah. Lembar 1 untuk administrasi kredit dan lembar 2 untuk nasabah. Berdasarkan SPK yang telah disetujui, administrasi kredit membuat perjanjian kredit (PK) sebanyak 2 lembar, lembar 1 untuk kasir dan lembar 2 untuk accounting.
- f) Kasir memberitahukan tentang pengikatan kepada nasabah. Selanjutnya nasabah memberikan jaminan asli, kemudian kasir melakukan realisasi kredit serta memberikan PK kepada nasabah. Jaminan asli diserahkan kepada administrasi kredit sebagai arsip.
- g) Berdasarkan PK, accounting melakukan pembukuan serta menyerahkan lembar PK kepada administrasi kredit sebagai arsip.
- h) Administrasi kredit menerima jaminan asli dan PK untuk dijadikan arsip.

Aspek yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit menurut Mulyadi adalah:

a. Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya

1) Pada saat permohonan kredit

Perusahaan menangani permohonan kredit adalah customer service yang mempunyai kemampuan memadai memberikan informasi dan penjelasan mengenai produk dan jasa serta memberikan keterangan dan persyaratan umum tentang permohonan kredit.

2) Pada saat proses analisis kredit

Personel yang melakukan proses analisis kredit adalah account officer yang memiliki kemampuan dan pengetahuan pada saat on the spot kunjungan langsung kepada calon debitur.

3) Pada saat penarikan kredit

Penarikan kredit dilakukan oleh Administrasi kredit yang telah melaksanakan perhitungan bunga pinjaman secara cermat dan teliti termasuk pembuatan jurnal pembukuan. Menyiapkan perjanjian kredit, pengikatan jaminan secara intern beserta kelengkapannya.

4) Pada saat monitoring

Monitoring dilakukan oleh Pembina Kredit. Pembina Kredit sebagai credit reviewer membuat rencana kunjungan, mengatur jadwal waktu kunjungan dan membuat laporan kunjungan. Pembina Kredit sebagai appraisal melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau tempat tinggal calon debitur.

b. Aspek pengendalian pemisahan tugas

1) Pada saat permohonan kredit

Pengendalian pemisahan tugas dinilai memadai, proses awal permohonan kredit ditangani oleh customer service untuk menjelaskan produk dan jasa, memberitahu syarat dan ketentuan permohonan kredit, serta meminta data calon debitur yang diperlukan.

2) Pada saat proses analisis kredit

Pengendalian pemisahan tugas pada proses analisis dinilai sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian analisis yang dilakukan account officer (AO) dan pembuatan proposal pengajuan kredit yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pemasaran untuk diajukan dalam Komite Kredit agar mendapatkan persetujuan.

3) Pada saat penarikan kredit

Pengendalian pemisahan tugas pada penarikan kredit dinilai sudah memadai. Petugas yang memberikan persetujuan atas penarikan berbeda dengan petugas yang menjalankan.

4) Pada saat monitoring

Pengendalian pemisahan tugas pada penarikan kredit dinilai sudah memadai. Administrasi Kredit memonitoring aktivitas rekening aktif debitur serta selalu menginformasikan kepada Pembina Kredit dalam bentuk collectability debitur.

c. Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat

1) Pada saat permohonan kredit

Pengendalian prosedur otorisasi pada saat permohonan kredit dinilai sudah sesuai dengan pengendalian kredit yang baik. Proses permohonan kredit telah sesuai dengan pedoman perkreditan yang dibuat oleh PT. KBPR Pancadana Batu.

2) Pada saat proses analisis kredit

Pengendalian prosedur otorisasi pada saat analisis kredit dinilai sudah sesuai dengan pengendalian kredit yang baik. Analisis kredit dilakukan oleh account officer (AO) selanjutnya dianalisa kembali oleh komite kredit yang memiliki wewenang dalam memantau dan mengevaluasi pemberian kredit.

3) Pada saat penarikan kredit

Pengendalian prosedur otorisasi pada saat penarikan kredit dinilai telah memadai. Account officer (AO) selaku pihak yang memiliki wewenang memberikan otorisasi penarikan kredit yang dibantu oleh administrasi kredit menyiapkan pencairan kredit beserta pengikatannya.

4) Pada saat monitoring

Pengendalian prosedur otorisasi pada saat monitoring dinilai sudah memadai. Monitoring dilakukan oleh account officer (AO) dengan memperhatikan catatan dari bagian Administrasi Kredit.

d. Aspek pengendalian dokumen dan catatan yang memadai

1) Pada saat permohonan kredit

Pada saat permohonan kredit nasabah memberikan data identitas berupa fotokopi identitas diri, fotokopi KK, fotokopi akta nikah, surat keterangan bekerja, serta fotokopi jaminan lain yang diperlukan. Kemudian mengisi formulir permohonan kredit untuk dicatat pada buku register permohonan kredit.

2) Pada saat proses analisis kredit

Pada saat proses analisis kredit account officer (AO) melakukan analisis berdasarkan data permohonan kredit yang selanjutnya melakukan peninjauan lapangan ketempat usaha atau tempat tinggal calon debitur. Kemudian membuat proposal kredit dan melakukan analisa usaha, ekonomi, keuangan, dan jaminan calon debitur selanjutnya diberikan kepada komite kredit untuk dimusyawarahkan. Hal ini telah mencerminkan pengendalian dokumen dan catatan yang memadai.

3) Pada saat penarikan kredit

Sebelum pencairan kredit, dipersiapkan nota permohonan kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur. Kemudian diberikan kepada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, dibuatkan pengikat kredit untuk selanjutnya dilakukan pencairan kredit.

4) Pada saat monitoring

Dokumen dan file kredit debitur disimpan pada bagian administrasi kredit yang sekaligus melakukan pengecekan terhadap file kredit secara rutin. Hal ini dilakukan dengan tujuan apabila terdapat penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan. Hal ini mencerminkan bahwa pengendalian dokumen dan catatan pada saat monitoring telah memadai.

e. Aspek pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan

1) Pada saat permohonan kredit

Pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan pada saat permohonan kredit dinilai telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari Peninjauan lapangan oleh account officer (AO) atas usaha dan tempat tinggal calon debitur dengan tujuan memeriksa kecocokan data yang ada pada formulir permohonan kredit serta keadaan jaminan.

2) Pada saat proses analisis kredit

Pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan pada saat analisis kredit dinilai telah memadai. Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh account officer (AO), dibuat laporan analisa kredit yang mencerminkan keadaan usaha dan jaminan calon debitur.

3) Pada saat penarikan kredit

Pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan pada saat penarikan kredit dinilai telah memadai. Melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan debitur, apakah kredit yang disalurkan telah digunakan sebagaimana mestinya.

4) Pada saat monitoring

Pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan pada saat monitoring dinilai telah memadai. Kunjungan langsung oleh account officer (AO) dilakukan secara rutin untuk memeriksa keadaan debitur dilapangan agar tidak terjadi tunggakan atau keterlambatan dalam membayarkan angsuran

f. Aspek pengendalian Pemeriksaan pekerjaan secara independen

Pemeriksaan pekerjaan secara independen secara umum dapat dikatakan baik. Dengan ditambahkan fungsi internal audit sebagai pelaksana pemeriksaan terhadap sistem yang ada serta pemeriksaan pekerjaan terhadap setiap bagian yang ada pada struktur organisasi. Hal ini telah membuktikan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan pada telah mampu mendukung pengendalian kredit bank secara efektif.

Suatu sistem pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, jika ada elemen system pengendalian intern yang baik pula. Elemen pengendalian intern sangat diperlukan untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh bagian yang bertugas untuk menjalankan sistem pemberian kredit, sehingga pelaksanaan kegiatan pemberian kredit dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari PT. BPR Bina Barumun mengenai unsur-unsur sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan antara bagian pelayanan kredit dengan bagian administrasi kredit. Didalam PT. BPR Bina Barumun bagian pelayanan kredit ditangani oleh bagian administrasi kredit legal sedangkan bagian administrasi kredit ditangani oleh bagian administrasi kredit angsuran.
- b. Adanya pembagian kerja yang tegas antara bagian penyidikan dan analisa kredit dengan bagian keputusan kredit. Didalam PT. BPR Bina Barumun bagian penyidikan dan analisa kredit yang ditangani oleh bagian surveyor mempunyai tugas untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang sebenarnya dari calon nasabah sedangkan bagian keputusan kredit yang dipegang oleh direktur operasional hanya menerima laporan penyidikan dan analisa kredit dari bagian administrasi kredit legal dan bagian surveyor dan kemudian memberi keputusan pemberian kredit di rapat komite.
- c. Adanya pemisahan antara bagian akuntansi dengan bagian keputusan kredit dan bagian pengawasan kredit.
- d. Adanya pemisahan antara bagian akuntansi dengan bagian pencairan kredit. Didalam PT. BPR Bina Barumun bagian akuntansi ditangani oleh bagian akuntansi sedangkan bagian pencairan kredit ditangani oleh bagian kasir.
- e. Transaksi pemberian kredit dalam PT. BPR Bina Barumun dilakukan oleh beberapa bagian, yaitu: bagian administrasi kredit legal yang menerima permohonan pengajuan kredit, bagian surveyor yang melakukan penyidikan dan analisa kredit, bagian administrasi kredit angsuran yang meneliti kelengkapan dan membuat berkas angsuran kredit, direktur operasional yang mengambil keputusan kredit, dan bagian kasir yang mencairkan dan menerima pelunasan kredit.

Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit

Sistem pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan bank, mengingat resiko yang ditimbulkan sangatlah beragam. Maka dari itu sistem pengendalian internal membutuhkan perhatian yang lebih untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Pemberian kredit dari bank merupakan salah satu produk yang memiliki peranan penting dalam memajukan sektor industri.

Menurut (M.Guy, 2012), didalam laporan COSO (Comitte Of Sponsoring Organizations) ada lima komponen dalam pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, pemrosesan informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dari lima komponen pengendalian internal tersebut, perlu adanya analisis dalam pemberian kredit untuk kelancaran bisnis dalam perusahaan. Berikut uraiannya:

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut (M.Guy 2012) lingkungan pengendalian (Control Environment) menentukan kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang disekitarnya. Lingkungan pengendalian mereleksikan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dewan direksi, manajemen, karyawan, serta pihak-pihak lainnya mengenai pentingnya pengendalian tersebut dan

penekanan yang diberikannya dalam sebuah entitas. Hal itu merupakan pondasi kedisiplinan dan struktur dari semua komponen pengendalian lainnya.

a. **Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi**

Menurut teori COSO, filosofi manajemen dan gaya operasi merupakan pendekatan umum dalam menjalankan suatu entitas. Salah satu aspek dari faktor ini adalah metode manajemen dalam mengambil dan memantau resiko bisnis. Sebagai contoh, manajemen bertindak hati-hati atau berani dalam mengevaluasi hasil potensial dari resiko dalam memantau kemajuan entitas setelah memutuskan untuk melaksanakan tindakan tertentu. menganalisis filosofi manajemen dan gaya operasi membutuhkan pertimbangan yang hati-hati. Kecenderungan manajemen untuk menjadi agresif dalam mengambil resiko bisnis atau menitikberatkan pada pencapaian tujuan tidak sepenuhnya merupakan faktor yang negatif.

Sikap yang menyadari pentingnya pengendalian akan terkomunikasikan pada para bawahan melalui gaya operasi manajemen. Jika disisi lain manajemen hanya sekedar berbicara mengenai perlunya pengendalian, maka para bawahan kemungkinan besar akan dapat merasakan sikap yang sesungguhnya dibalik kalimat tersebut. Selanjutnya, tujuan pengendalian tidak dapat tercapai. pentingnya pengendalian yang ada di organisasi ini, seperti halnya pada bagian-bagian yang menangani masalah kredit. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah manajemen, dalam pemberian kredit PT. BPR Bina Barumun komite kredit berfungsi sebagai pihak manajemen yang mana mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat persetujuan dan penolakan kredit bank yang diajukan oleh nasabah. manajemen sangat mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan permohonan kredit nasabah.

Berdasarkan analisa di atas, maka pihak manajemen pada PT. BPR Bina Barumun sudah menjalankan peran pentingnya dalam pengambilan keputusan dalam permohonan kredit nasabah sesuai dengan teori mengenai filosofi manajemen dan gaya operasi.

b. **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab**

Menurut teori, personal entitas harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan entitas, bagaimana tindakan mereka saling berhubungan dan memberikan kontribusi pada tujuan tersebut, serta bagaimana dan untuk apa mereka mengemban tanggung jawab. Manajemen dapat menggunakan beberapa metode untuk mempromosikan pemahaman ini, termasuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab atas aktivitas tertentu, menetapkan prosedur kewenangan, melakukan spesifikasi dan mengkomunikasikan praktik-praktik bisnis yang tepat, dan menyediakan sumberdaya untuk pelaksanaan tugas.

PT. BPR Bina Barumun memiliki job description secara tertulis untuk karyawannya yang ada pada perusahaan. Sehingga karyawan PT. BPR Bina Barumun memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan. Tidak ada perlakuan atau pengendalian khusus dari manajemen untuk bagian tertentu pada devisi kredit. Semua mendapatkan perhatian dan fokus dari manajemen secara merata. Prosedur permohonan kredit yang ada pada PT. BPR Bina Barumun terdapat bagian yang menangani dua pekerjaan (double job) yaitu bagian administrasi, dimana bagian administrasi menangani pengadministrasian dan pengarsipan.

Pada struktur organisasi dan job description PT. BPR Bina Barumun dijelaskan masing-masing wewenang dan tanggung jawab perbagian. Dan pada bagian administrasi dan juga bagian pengarsipan mempunyai perbedaan wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya bagian yang mempunyai dua pekerjaan (dou-

ble job), hal ini bisa mengakibatkan adanya tanggung jawab yang tidak maksimal yang dijalankan atau dapat terjadi adanya kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Dimana pada saat dokumen diarsipkan pada bagian administrasi seperti surat penolakan kredit, form hasil analisa, surat perjanjian kredit, dan lain sebagainya dapat menjadi pemicu adanya manipulasi data yang dibuat dari dokumen yang telah diarsipkan untuk membuat dokumen baru.

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab perbagian pada PT. BPR Bina Barumun masih belum sesuai dengan teori, karena terdapat bagian yang merangkap jabatan yaitu bagian administrasi dan bagian pengarsipan. Yang dapat memicu adanya kecurangan terjadi pada perusahaan.

2. Penilaian Resiko Menurut teori

Menurut teori, resiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Resiko mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk berhasil, bersaing dalam industri, terkait produk, jasa yang ada pada perusahaan. resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisa serta dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

Kendala-kendala yang terjadi dalam penagihan kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun

Sepandai apapun analisa kredit yang dilakukan, kemungkinan terjadinya kredit macet pasti ada. Dalam hal ini penyebab kegagalan yang biasa dihadapi ada dua, yaitu misalnya dalam melakukan analisis, pihak manajer atau bagian kredit kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada PT.BPR Bina Barumun, sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur keamanan untuk membayar. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mau membayar tetapi tidak mampu. Contoh: kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir atau bangkrut. Sehingga untuk membayar kredit tidak ada.

Upaya Pemecahan Masalah Kredit Bermasalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun

Untuk mengantisipasi kredit macet PT.BPR Bina Barumun memerlukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan PT.BPR Bina Barumun adalah sebagai berikut:

1. Rescheduling

Memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Reconditioning

3. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

4. Penurunan suku bunga

Penurunan suku Bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.

Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

5. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

6. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangutangnya. Debitur yang sudah menunggak ≥ 1 bulan, maka account officer wajib melakukan pengawasan minimal 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo angsurannya. Dan untuk kredit yang outstanding kredit diatas 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) maka wajib melakukan pengawasan langsung ke debitur minimal 1 kali dalam 3 bulan, dan hasil pengawasan kredit tersebut harus dilaporkan secara tertulis didalam laporan Monitoring dan pengawasan kredit. Untuk kredit yang outstanding kredit dibawah 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka wajib melakukan pengawasan secara administrative (pembayaran angsuran) dan pengawasan secara administratif yang dapat dilakukan setiap saat. Untuk debitur yang menunggak $\geq 6x$ angsuran maka akan diberikan perjanjian kredit baru dan account office akan mensurvei secara on the spot ke lokasi debitur.

7. Pemantauan

Menurut teori, pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang telah ditetapkan sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada pada perusahaan. Pengendalian internal dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus. Usaha pemantauan terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Pada PT.BPR Bina Barumun pemantauan yang dilakukan adalah adanya kegiatan audit internal, dimana dalam audit internal ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu kegiatan, apakah sesuai tidaknya kegiatan yang ada pada perusahaan dengan prosedurnya. Berdasarkan analisa di atas, pemantauan yang dilakukan pada PT. BPR Bina Barumun sesuai dengan teori. Pemantauan dilakukan oleh bagian pengawas (SPI) yang secara langsung mengawasi, mengecek, dan mengevaluasi kegiatan yang terjadi pada perusahaan, dengan tujuan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang ada pada perusahaan.

Berdasarkan analisa di atas, PT. BPR Bina Barumun dalam melakukan penyelamatan kredit dalam menangani kredit macet telah sesuai dengan teori yaitu dengan menggunakan rescheduling, reconditioning, dan penyitaan jaminan. Menurut teori, untuk melaksanakan pengendalian yang baik, pencatatan harus diawasi. Untuk menghindari adanya kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Data dan pencatatan yang tidak dijaga akan dicuri, diubah, hilang ataupun dihancurkan yang mengganggu proses akuntansi dan proses bisnis.

Dalam proses kredit pada PT. BPR Bina Barumun, dokumen-dokumen permohonan kredit itu harus dijaga, karena apabila dokumen tersebut dicuri atau diubah maka dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen nasabah dalam permohonan kredit disimpan diruang pengarsipan untuk menjaga keamaannya. Namun pendistribusian dokumen pada PT. BPR Bina Barumun kurang terstruktur karena tidak ada alur tertulis. Berdasarkan analisa di atas, da-

lam pendistribusian dokumen permohonan kredit pada PT. BPR Bina Barumun masih perlu diperbaiki agar dapat terkontrol dengan baik. Karena dengan adanya pendistribusian yang benar maka kecuranganpun tidak akan terjadi.

Menurut teori, komunikasi juga mencakup tujuan yang lebih luas dalam hal memberikan pemahaman yang jelas tentang peranan individu dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian internal. Komunikasi mencakup perluasan pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya.

4. KESIMPULAN

Lingkungan pengendalian yang ada pada PT.BPR Bina Barumun yang mencakup filosofi manajemen dan gaya operasi serta pendelegasian tanggung jawab dan wewenang sudah berjalan, namun terdapat bagian yang merangkap jabatan yaitu bagian administrasi dengan bagian pengarsipan, yang dapat memicu adanya kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Penilaian resiko akan terjadinya kredit macet telah diantisipasi oleh PT.BPR Bina Barumun. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan adanya penyelamatan kredit yang meliputi rescheduling, reconditioning, dan penyitaan jaminan. Aktivitas pengendalian pada PT. BPR Bina Barumun sudah berjalan namun masih tetap membutuhkan sedikit perbaikan untuk memperketat pengendalian. Dalam menjalankan kegiatannya PT. BPR Bina Barumun memiliki ruangan khusus yang digunakan dalam pengarsipan dokumennya, namun dalam pendistribusian dokumen pemberian kredit kurang terstruktur, karena tidak ada alur tertulis yang mengaturnya.

Adapun saran dari peneliti ini adalah Bagi PT.BPR Bina Barumun agar dapat meningkatkan tingkat kualitas pengendalian internal pemberian kredit agar kredit bermasalah atau kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Penambahan karyawan yang memiliki komitmen terhadap kompetensi, dengan merekrut karyawan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Agar tidak terjadi perangkapan tugas. Terus tingkatkan kinerja yang sudah terprogram sesuai dengan prosedur agar dapat terkontrol dengan baik serta terstruktur karena dengan adanya pendistribusian yang benar maka kecuranganpun tidak akan terjadi.

REFERENSI

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. (2012). Manajemen Pemasaran . Jakarta: Rajawali Pers.
- Alvin, A. R. (2014). Auditing and Assurance service. Edisi kedua belas. Jilid Satu. Jakarta: Erlangga.
- Amin Widjaja Tunggal. (2010). Audit kecurangan dan akuntansi forensik. Jakarta: Harvarindo.
- Arens A., Randal J. Elder, Mark S, Beasley. (2011). Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach 14th edition. New Jersey: Prentice-Hall.
- Diana, A. (2011). Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
- Gondodiyoto, S. (2012). Audit Sistem Informasi Lanjutan + Standar.
- Guy, M. (2011). Auditing, Jilid II, Edisi 5, Jakarta: Erlangga Halim, A. (2011). Analisis Investasi. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Horngren, Harrison. (2012). Akuntansi Keuangan Edisi Delapan Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusuf. (2011). Jasa Audit dan Assurance. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lubis, H. Z., & Ismaya, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Kelas. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 206-215.
- Lubis, H. Z., Effendi, S., & Fatmawarni, F. (2021, November). Online Accounting Learning Problems Analysis During the Covid-19 Pandemic. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 447-454).
- Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta: Salemba Empat
- Nainggolan, E. P., & Lorenza, S. (2021, November). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Kulit Kerang Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Nita, S. (2021). Arrangement of Joint Commitment In Protection Of Human Rights In The Region of ASEAN. *Journal of Strategic and Global Studies*, 4(2), 2.
- O'Brien, James. A (Dewi Fitriarsari dan Deny Arnos Kwary, Penerjemah). (2014). Pengantar Sistem Informasi. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Panduan, dan Prosedur Audit SI dari ISACA. Edisi Asli. Jakarta: Mitra Wacana.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. (2011). Manajemen Perkreditan Bank Umum Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Rambe, I., & Swara, D. W. (2021, August). Pengaruh Perputaran Kas Perputaran Persediaan dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap Return On Equity yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 123-132).
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (8).
- Sri, D. (2021, August). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 706-712).
- Supramo, Gatot. (2012). Perjanjian Utang-Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Susanto, A. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Veithzal Rivai, dkk. (2013). Manajemen. Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik. Depok. PT Rajagrafindo Persada.